

OP-010
**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA HIJAU DI
SUMATERA BARAT**

Nofriya

Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Andalas
e-mail: nofriya_firdaus@yahoo.com

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam kegiatan pariwisata. Pembangunan pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat sering menyebabkan rasa terpinggirkan di antara masyarakat setempat sehingga dapat menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan kalangan investor pariwisata dan pemerintah. Dalam konsep pariwisata hijau, wisatawan dan masyarakat haruslah menghormati budaya lokal dan menjaga kelestarian lingkungan agar wisata dapat dinikmati tanpa ada gangguan dan masalah lingkungan. Sumatera Barat memiliki kekayaan destinasi wisata yang cukup banyak dan beragam, tetapi masih berhadapan dengan masalah lingkungan seperti sampah yang berserakan, pembangunan akomodasi seperti restoran, tempat pemandian dan tempat peristirahatan yang tidak pada tempatnya, dan pengaturan parkir yang masih tidak tertata dengan rapi. Pariwisata haruslah memperhatikan daya dukung lingkungan, terutama pada daerah wisata buatan. Hal ini masih belum diperhatikan terlihat pada kolam pemandian yang teletak di pinggir jalan Padang-Bukittinggi di daerah Lembah Anai yang dibangun di atas sempadan sungai sehingga berpotensi merusak fungsi sungai. Selain itu masih ditemukan sampah berserakan di sekitar objek wisata, terutama wisata pantai. Adanya fasilitas tempat pembuangan sampah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh wisatawan dan masyarakat setempat. Wisata Danau Maninjau juga terganggu akibat kegiatan tambak ikan yang berlebihan sehingga menimbulkan kematian ikan akibat “tubo belerang” dikarenakan pembusukan kandungan hara yang sudah melewati ambang batas. Oleh karena itu, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah pariwisata harus dilakukan agar masyarakat tidak hanya mengambil keuntungan dari besarnya potensi pariwisata di Sumatera Barat. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah kegiatan ekonomi berbasis masyarakat yaitu dengan mengkomersilkan produk dan budaya lokal agar dapat dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung. Kemudian dilakukan edukasi lingkungan bagi masyarakat yaitu dengan diadakannya pembinaan oleh Dinas Pariwisata atau Badan Lingkungan Hidup Daerah mengenai cara pengelolaan limbah padat dan cair yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata dan akomodasi seperti tempat penginapan, restoran, dan lain-lain. Selain itu, kegiatan yang paling penting adalah penetapan zonasi daerah pariwisata sehingga dapat diketahui batas-batas pemanfaatan fungsi daerah pariwisata sehingga tidak mengganggu fungsi lingkungan.

Kata kunci: Peran serta masyarakat, pariwisata hijau, pembangunan pariwisata berkelanjutan

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu industri yang berdampak pada kehidupan sosial, lingkungan dan ekonomi. Hal inilah yang mendorong banyak negara tertarik untuk mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan, terutama bagi negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Sebagai salah satu industri terbesar di dunia, perkembangan pariwisata diharapkan pariwisata mampu meningkatkan perekonomian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana dikembangkannya pariwisata tersebut (Evita dkk, 2012).

Pembangunan pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat sering menyebabkan rasa terpinggirkan di antara masyarakat setempat sehingga dapat menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan kalangan investor pariwisata dan pemerintah (Santosa, 2013) yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan pembangunan pariwisata itu sendiri.

Sumatera Barat dijadikan salah satu target utama Pariwisata Indonesia. Sumatera Barat sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya (Alfonso, 2012). Sumatera Barat memiliki kekayaan destinasi wisata yang cukup banyak dan beragam, tetapi masih berhadapan dengan masalah lingkungan. Pariwisata haruslah memperhatikan daya dukung lingkungan, terutama pada daerah wisata buatan. Hal ini masih belum diperhatikan terlihat pada kolam pemandian yang teletak di pinggir jalan Padang-Bukittinggi di daerah Lembah Anai yang dibangun di atas sempadan sungai sehingga berpotensi merusak fungsi sungai. Selain itu masih ditemukan sampah berserakan di sekitar objek wisata, terutama wisata pantai. Adanya fasilitas tempat pembuangan sampah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh wisatawan dan masyarakat setempat. Wisata Danau Maninjau juga terganggu akibat kegiatan tambak ikan yang berlebihan sehingga menimbulkan kematian ikan akibat "tubo belerang" dikarenakan pembusukan kandungan hara yang sudah melewati ambang batas. Oleh karena itu, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah pariwisata harus dilakukan agar masyarakat tidak hanya mengambil keuntungan dari besarnya potensi pariwisata di Sumatera Barat.

2. BAHASAN UTAMA

2.1 Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mempertimbangkan kebutuhan masa sekarang dan akan datang tanpa merusak alam dan budaya sekitar sehingga dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Pengelolaan pariwisata diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terkait seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat setempat. Untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan diperlukan rasa tanggungjawab dan tidak mengakibatkan kerusakan alam dan budaya serta menghormati adat istiadat destinasi wisata (Mahdayani, 2009). Wisata berkelanjutan

dipandang sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi kawasan pariwisata dan serta meningkatkan penyediaan jasa di sekitar kawasan wisata (Satria, 2009).

2.2 Pariwisata Hijau (*Green Tourism*)

Konsep pariwisata hijau mengembangkan program pariwisata yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperkenalkan dan mempertahankan budayanya. Pariwisata hijau menekankan keberlanjutan akan lingkungan, kebudayaan, dan juga komunitas pada lokasi wisata yang dikunjungi nantinya (Wardhani dan Valeriani, 2016). Empat hal yang dijadikan acuan dalam menetapkan sebuah destinasi sebagai *green tourism* yaitu pariwisata berdasarkan alam yang dimiliki, dukungan konservasi, keberlanjutan dan pendidikan lingkungan (Weaver, 2012). Jadi, *green tourism* diharapkan dapat memupuk perilaku masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan dan meningkatkan kelestarian alam, budaya, dan sosial destinasi wisata.

Selain itu dikenal istilah ekowisata, yaitu kegiatan pariwisata yang dilakukan pada lingkungan alam dan memberikan kontribusi terhadap kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Mahdayani, 2009). Menurut Wood (2002) terdapat delapan prinsip yang dapat dilaksanakan agar ekowisata dapat dijadikan pembangunan berbasis kerakyatan, yaitu:

1. Mencegah dan menanggulangi dampak aktifitas wisatawan yang dapat merugikan alam dan budaya setempat
2. Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi;
3. Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan dari kegiatan wisata
4. Melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pengawasan kegiatan wisata
5. Kegiatan pariwisata memberikan keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat
6. Menjaga keharmonisan dengan alam
7. Memperhatikan daya dukung lingkungan alam yang biasanya mempunyai daya dukung lebih rendah daripada daya dukung kawasan buatan; dan
8. Memberikan peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara.

Masalah yang masih sering ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan ekowisata adalah (Satria, 2009):

1. Masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sekitar dan turis tentang konsep ekowisata, lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan menindak secara tegas masalah kerusakan lingkungan yang terjadi di tempat wisata.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam ekowisata karena masyarakat seringkali hanya sebagai obyek

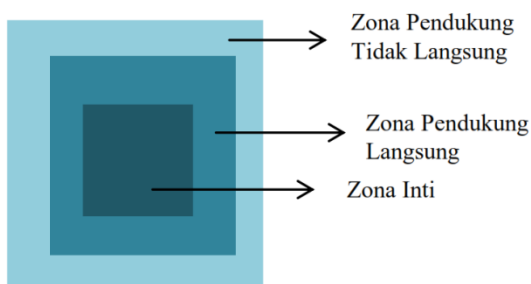
atau penonton, tanpa mampu terlibat aktif dalam setiap proses-proses ekonomi didalamnya.

3. Lemahnya peran dan pengawasan pemerintah untuk mengembangkan wilayah wisata secara baik sehingga terjadi kesalahan persepsi dalam pengelolaan daerah ekowisata.

2.3 Penetapan Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata di Sumatera Barat dapat diatur pembagiannya menurut zona-zona tertentu sehingga tidak terjadi kesembrautan kegiatan pariwisata antara objek wisata utama dengan fungsi ekonomi atau akomodasi yang dapat mengurangi atau merusak kelestarian lingkungan. Pemerintah di setiap kabupaten/kota dapat membagi daerah wisata ini sesuai dengan fungsinya sendiri. Penetapan zona pada daerah wisata dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat yang akan dilibatkan untuk mencapai kegiatan pariwisata yang berkelanjutan.

Secara spasial, pengembangan kawasan wisata dapat dilakukan dengan penentuan zona wisata yang menggunakan teknik *overlay* dengan *Geographic Information System*. Analisis *overlay* ini bertujuan menentukan zona pada kawasan wisata sehingga didapatkan zona inti, zona pendukung langsung dan zona pendukung tidak langsung.



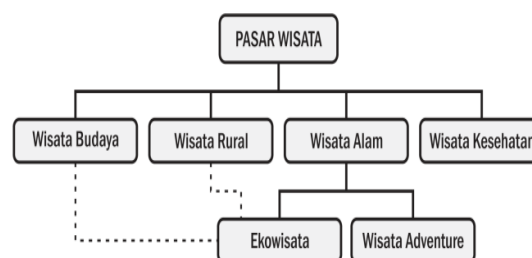
Gambar 1. Teknik Overlay Penetapan Zona Pariwisata

Zona inti adalah area objek wisata utama yang menjadi *point of interest* wisatawan. Zona pendukung langsung merupakan akomodasi yang menunjang kegiatan pariwisata seperti tempat penginapan, sentra kerajinan/oleh-oleh, kantin, tempat parkir dan akomodasi penunjang lainnya yang dikelola oleh masyarakat. Zona pendukung tidak langsung yaitu daerah yang mendapat dampak tidak langsung karena adanya kegiatan wisata di zona inti (Sasono dan Umilia, 2015). Semua kegiatan dalam zona pariwisata ini harus memperhatikan aspek lingkungan terutama penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah padat dan cair sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Hal ini memerlukan edukasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui perpanjangan tangannya di daerah seperti Badan Lingkungan Hidup Daerah, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan pemerintah daerah setempat.

2.4 Peran Serta Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta agar masyarakat mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, peran serta masyarakat adalah hal penting untuk memastikan pembangunan kepariwisataan berjalan secara berkelanjutan dan masyarakat diharapkan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari aktivitas pariwisata yang terdapat di daerahnya.

Pariwisata hijau juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat terutama jika dilakukan dengan menggunakan sumber daya lokal seperti transportasi, akomodasi dan jasa pemandu. Untuk mencapai pelayanan yang lebih baik, pendapatan pariwisata dapat dialokasikan untuk pengembangan kemampuan masyarakat pengelola dengan meningkatkan jenis usaha atau atraksi budaya yang akan ditampilkan. Selain itu, kegiatan penanaman nilai-nilai menjaga kelestarian lingkungan adalah hal yang tidak boleh terluakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Mahdayani, 2009).



Gambar 2. Fungsi Ekonomi Pariwisata Sebagai Pasar Wisata

Peran serta masyarakat akan timbul karena adanya manfaat langsung dari lingkungan sekitar pariwisata. Agar dapat memberikan manfaat, maka lingkungan tersebut harus dijaga. Hal tersebut adalah hubungan timbal balik antara kegiatan pariwisata, pengelolaan dan manfaat yang didapatkan dari lingkungan sekitar pariwisata. Bila alam dijaga kelestariannya, maka masyarakat sendiri yang akan menikmati kelestarian tersebut. Begitupun dengan kegiatan pariwisata, jika kelestarian lingkungan sekitar daerah pariwisata dijaga dengan baik, maka masyarakat yang akan mendapatkan keuntungannya secara ekonomi (Mahdayani, 2009).

Menurut Woodley (1993) "*Local people participationis aprerequisite for sustainabetourism*". Oleh karena itu, dalam konseppemberdayaan, agar masyarakat mau ikut berperan serta dalam kegiatan pariwisata yang tidak merusak lingkungan terdapat tiga komponen yang harus ada, yaitu:

1. *Enabling setting*, yaitu memperkuat situasi di daerah pariwisata termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar masyarakat dapat berkreatifitas.
2. *Empowering local community*, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal

melalui pendidikan, pelatihan dan berbagai bentuk pengembangan lainnya

3. *Socio-political support*, yaitu diperlukan adanya dukungan sosial, dukungan politik, *networking* oleh pemerintah setempat, dinas pariwisata dan elemen lain yang mendukung.

2.5 Potensi Pariwisata Sumatera Barat sebagai Wadah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pariwisata Hijau

Beberapa destinasi wisata Sumatera Barat yang diunggulkan pada beberapa tahun terakhir diharapkan tidak akan rusak citranya karena kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar daerah pariwisata. Sejak meningkatnya aktifitas media sosial, destinasi wisata di Sumatera Barat yang selama ini belum banyak dikenal khalayak ramai menjadi viral di dunia maya dan terkenal sehingga mulai dikunjungi banyak wisatawan. Beberapa destinasi wisata yang menjadi unggulan tersebut diantaranya:

1. Kepulauan Mentawai, yang termasuk salah satu daerah dengan ombak terbaik di dunia untuk kegiatan *surfing* oleh para *surfers* mancanegara. Selain itu kebudayaannya yang khas adalah potensi terbesar untuk dijadikan destinasi wisata dan perlu digali kearifan lokalnya untuk menjaga lingkungan agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar yang dapat mengancam kelestarian alam dan budaya setempat.
2. Kawasan Wisata Mandeh, yang dimasukkan kedalam salah satu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS). Dengan adanya kebijakan ini, kemungkinan datangnya investor asing akan lebih tinggi dan dapat mengancam keberadaan penduduk lokal untuk dapat mengelolanya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dan edukasi mengenai kelestarian lingkungan perlu dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan kunjungan wisata di daerah ini tanpa harus menyerahkan sebagian besar pengelolaannya kepada investor asing.
3. Air terjun dan pemandian alami yang jauh dari pusat kota dan pemerintahan seperti Air Terjun Nyarai, Pemandian Alam Sako Tapan, dan Air Terjun Timbulun. Masyarakat setempat dapat menjaga kelestarian alam di destinasi wisata ini dari perilaku wisatawan yang kurang baik dengan memberikan panduan wisata agar tidak merusak kelestarian alam yang dikunjungi.
4. Danau Tarusan Kamang, yang memiliki keunikan dapat kering dan tergenang pada waktu-waktu tertentu sehingga menarik banyak wisatawan untuk berkunjung. Danau ini memiliki pemandangan yang khas ditambah dengan aktifitas masyarakat setempat menggunakan rakit untuk mencari ikan saat air tergenang sehingga menambah keunikan daerah ini. Pengelolaan lingkungan daerah ini perlu diperhatikan terutama dengan menyediakan tempat pembuangan sampah agar tidak ditemukan sampah berserakan di sekitar danau. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan meningkatnya jumlah pengunjung dan ini dapat menjadi potensi ekonomi masyarakat sekitar dengan melakukan aktifitas berjualan makanan di sekitar danau.

Selain destinasi wisata tersebut, objek wisata lainnya yang ada di Sumatera Barat perlu dikelola lebih baik lagi agar mampu mendukung perekonomian masyarakat sekitar dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan agar pariwisata tersebut dapat terlaksana secara berkelanjutan.

3. KESIMPULAN

Sumatera Barat memiliki potensi destinasi wisata yang perlu dijaga kelestariannya dengan melibatkan masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah kegiatan ekonomi berbasis masyarakat yaitu dengan mengkomersilkan produk dan budaya lokal agar dapat dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung. Kemudian dilakukan edukasi lingkungan bagi masyarakat mengenai cara pengelolaan limbah yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata dan akomodasi seperti tempat penginapan, restoran, dan lain-lain. Selain itu, kegiatan yang paling penting adalah penetapan zonasi daerah pariwisata sehingga dapat diketahui batas-batas pemanfaatan fungsi daerah pariwisata sehingga tidak mengganggu fungsi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfonso. 2012. Potensi Daya Tarik Obyek Pariwisata Dalam Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat Vol. 1 No. 1*
- Evita, R., Sirtha, IN., Sunartha, IN. 2012. Dampak Perkembangan Pembangunan Sarana Akomodasi Wisata Terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Bali. Laporan Penelitian. Universitas Udayana
- Koddeng, B. 2007. Pengembangan Kawasan Pariwisata (Tepian) Makassar Sebuah Praxis: *Waterfront Development Concept. RONA Jurnal Arsitektur FT-Unhas Volume 4 No. 1*
- Mahdayani, W. 2009. *Ekowisata Panduan Dasar Pelaksanaan*. Nias Selatan: UNESCO dan Dinbudpar Nias Selatan
- Santosa, IN., Mahagangga IGAO. 2013. Pengembangan Destinasi Berkualitas di Bali. Laporan Penelitian. Universitas Udayana
- Sasono, APM., Umilia, E. 2015. Kriteria Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Jalan Besar Ijen Kota Malang. *Jurnal Teknik ITS Vol. 4, No.2*
- Satria, D. Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 3 No. 1 Mei 2009*
- Wardhani, RS., Valeriani, D. 2016. Green Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bangka Belitung. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016*
- Weaver, DB. 2012. Organic, Incremental And Induced Paths To Sustainable Mass Tourism Convergence. *Tourism Management 33*

Wood, ME. 2002. *Ecotourism: Principle, Practices and Policies for Sustainability*. United Nations Environment Programme. Division of Technology, Industry and Economics
Woodley, A. 1993. Tourism and sustainable development: The community perspective. In

J. G. Nelson, R. Butler, & G. Wall, *Tourism and sustainable development: monitoring, planning, managing* (pp. 135}146). Waterloo: Heritage Resources Centre, University of Waterloo